**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SMART CITY* DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Fajar Rizky Ananta**

**(2416041070)**

**Reguler C**

****

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**BAB III**  
**METODE PENELELITIAN**

**3.1 Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memahami realitas sosial dan menentukan langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan. Penelitian ini menggunakan **paradigma konstruktivis (interpretif)** karena berusaha memahami makna di balik tindakan sosial manusia, bukan sekadar menjelaskan hubungan sebab-akibat. Paradigma ini memandang bahwa realitas sosial bersifat relatif, dinamis, dan dibentuk melalui interaksi antarindividu dalam konteks sosial tertentu (Creswell, 2016). Dengan demikian, peneliti menempatkan diri sebagai instrumen utama yang berupaya memahami pengalaman subjektif, nilai, dan persepsi para pelaku kebijakan *Smart City* di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan konstruktivis berasumsi bahwa setiap individu memiliki interpretasi unik terhadap fenomena sosial yang dihadapinya. Hal ini berarti bahwa kebenaran bersifat jamak (*multiple realities*) dan dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, dan pengalaman setiap aktor yang terlibat dalam kebijakan publik. Simbolon et al. (2024) menegaskan bahwa penelitian dengan paradigma konstruktivis penting digunakan untuk menggali makna mendalam dari interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman makna yang muncul dari praktik implementasi *Smart City*, seperti bagaimana para aktor memaknai konsep "kota cerdas", bagaimana tantangan diinterpretasikan, dan bagaimana strategi dibangun secara kolektif, bukan pada pengujian hipotesis.

Paradigma ini juga menuntut peneliti untuk terlibat langsung dalam konteks alami tempat fenomena terjadi. Artinya, peneliti tidak memanipulasi situasi, melainkan berusaha memahami kondisi apa adanya berdasarkan persepsi para pelaku kebijakan dan masyarakat penerima manfaat. Melalui interaksi langsung di lapangan, peneliti dapat menafsirkan dinamika implementasi kebijakan yang kompleks dan kontekstual, seperti bagaimana kebijakan *Smart City* diadaptasi dengan kondisi lokal dan budaya birokrasi setempat. Dengan demikian, paradigma konstruktivis menjadi landasan yang sesuai untuk mengkaji pelaksanaan *Smart City* yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan persepsi yang beragam, serta dimensi sosial yang kompleks.

**3.2 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **kualitatif dengan tipe deskriptif**. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam proses implementasi kebijakan *Smart City* di Kota Bandar Lampung. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna di balik perilaku manusia dan peristiwa sosial dalam konteks yang alami. Pendekatan ini digunakan karena lebih mampu menangkap nuansa, pengalaman, pandangan, dan interpretasi para pelaku kebijakan dibandingkan sekadar mengukur angka atau data statistik, yang mungkin tidak dapat mengungkap kompleksitas dinamika sosial di balik sebuah kebijakan.

Tipe deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemaparan fenomena sebagaimana adanya. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan kondisi empiris implementasi *Smart City* tanpa manipulasi atau intervensi terhadap variabel yang diteliti. Simbolon et al. (2024) menyebutkan bahwa metode kualitatif deskriptif efektif digunakan untuk menelaah proses kebijakan publik yang berlangsung secara kompleks dan melibatkan banyak aktor. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga faktor pendukung dan penghambatnya.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, dan birokratis yang memengaruhi jalannya implementasi *Smart City*. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan data tertulis, tetapi juga mengutamakan pengalaman langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam untuk menangkap realitas yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Dengan cara ini, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan holistik mengenai hubungan antaraktor, tantangan, serta strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang realistis, mendalam, dan bermakna tentang praktik *Smart City* di tingkat daerah.

**3.3 Metode Operasionalisasi Konsep**

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk mengoperasionalkan konsep adalah **teori implementasi kebijakan publik dari Thomas B. Smith**. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat unsur utama yang saling berinteraksi: kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), kelompok sasaran (*target group*), organisasi pelaksana (*implementing organization*), dan faktor lingkungan (*environmental factors*). Interaksi dinamis antar keempat unsur inilah yang membentuk dinamika dan menentukan efektivitas akhir dari suatu kebijakan publik. Dengan demikian, teori ini sangat sesuai digunakan untuk menganalisis kebijakan *Smart City* yang bersifat multi-dimensi dan melibatkan banyak pemangku kepentingan serta faktor eksternal.

Prasetyo, Basori, dan Purwanti (2024) menunjukkan bahwa keempat unsur dalam model Thomas B. Smith relevan untuk menilai pelaksanaan *smart governance* di berbagai daerah di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, keempat unsur tersebut dioperasionalkan sebagai berikut:

1. **Kebijakan yang Diidealkan:** Mencakup visi, misi, strategi, dan tujuan *Smart City* yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Peraturan Walikota, dan *masterplan* *Smart City* Kota Bandar Lampung.
2. **Kelompok Sasaran:** Meliputi masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai pengguna akhir layanan digital, serta pelaku usaha (UMKM) yang terdampak penerapan *Smart City*.
3. **Organisasi Pelaksana:** Terdiri atas Dinas Komunikasi dan Informatika (sebagai leading sector), Bappeda (dalam perencanaan dan penganggaran), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.
4. **Faktor Lingkungan:** Mencakup kondisi infrastruktur teknologi (seperti jaringan internet dan data center), kondisi sosial-budaya masyarakat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparatur, dukungan politik, dan anggaran.

Dengan mengacu pada teori tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana kebijakan *Smart City* diterjemahkan dari konsep ideal menjadi praktik nyata di lapangan. Keempat unsur tersebut menjadi pedoman dalam menyusun pedoman wawancara, lembar observasi, dan matriks analisis dokumen agar data yang dikumpulkan relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor penghambat dan pendukung yang muncul selama implementasi kebijakan berlangsung, seperti kesenjangan antara kebijakan ideal dengan kapasitas organisasi pelaksana. Oleh karena itu, teori Thomas B. Smith dijadikan sebagai landasan konseptual utama dalam penelitian ini.

**3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik triangulasi ini digunakan untuk memastikan kedalaman dan keakuratan data.

1. **Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*):** Teknik ini dilakukan kepada pejabat dan staf di Dinas Kominfo, Bappeda, dan OPD terkait yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan *Smart City*. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam program *Smart City*. Menurut Simbolon et al. (2024), wawancara mendalam penting dilakukan untuk memahami persepsi, pengalaman, motivasi, dan strategi para pelaku kebijakan di lapangan. Melalui wawancara semi-terstruktur dengan panduan wawancara, peneliti memperoleh data yang kaya akan makna dan konteks sosial yang melatarbelakangi kebijakan.
2. **Observasi:** Teknik ini merupakan pengamatan langsung dan tidak berpartisipasi terhadap proses pelaksanaan kebijakan dan aktivitas pelayanan publik berbasis digital di Kota Bandar Lampung, seperti pengamatan di *command center*, loket pelayanan, atau acara sosialisasi. Observasi memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana kebijakan *Smart City* diterapkan dalam praktik birokrasi sehari-hari dan bagaimana interaksi antara aparat dengan masyarakat. Prasetyo et al. (2024) menekankan bahwa observasi memberikan data empiris yang otentik dan kontekstual, yang tidak bisa sepenuhnya diperoleh hanya melalui wawancara. Dengan demikian, observasi menjadi cara penting untuk memahami kesenjangan (*gap*) antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan.
3. **Studi Dokumentasi:** Teknik ketiga adalah pengumpulan dan analisis data dari berbagai dokumen resmi. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Tahunan Dinas Kominfo, *masterplan* *Smart City*, berita acara rapat, serta publikasi di website resmi pemerintah. Menurut Wahyudi, Widowati, dan Nugroho (2023), analisis dokumen membantu menguji konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan, serta melacak perkembangan kebijakan dari waktu ke waktu. Dokumentasi juga berguna untuk memverifikasi dan mengkroscek data hasil wawancara dan observasi agar penelitian lebih kredibel. Dengan mengombinasikan ketiga teknik ini, peneliti berusaha memperoleh data yang valid, andal, dan komprehensif mengenai implementasi *Smart City* di Kota Bandar Lampung.

**3.5 Metode Pengujian Data**

Untuk memastikan keabsahan (*trustworthiness*) data dalam penelitian kualitatif ini, digunakan empat kriteria dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu **kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas**.

1. **Kredibilitas (*Credibility*):** Kredibilitas dilakukan dengan cara **triangulasi**, yaitu membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber (pejabat dari OPD berbeda), metode (wawancara, observasi, dokumen), dan waktu. Nur Sukmawati et al. (2023) menegaskan bahwa penggunaan triangulasi sangat penting untuk menjamin keandalan hasil penelitian kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor. Selain itu, dilakukan **uji ulang informan (*member check*)** dengan mengonfirmasi kembali hasil transkrip wawancara dan interpretasi sementara kepada informan untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap peneliti sesuai dengan maksud informan.
2. **Transferabilitas (*Transferability*):** Transferabilitas tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi statistik, tetapi untuk memberikan konteks yang cukup bagi pembaca. Hal ini dicapai dengan memberikan **deskripsi konteks penelitian yang kaya, rinci, dan mendalam (*thick description*)**, termasuk tentang setting lokasi, karakteristik informan, dan proses penelitian. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah temuan penelitian ini dapat ditransfer atau diterapkan pada konteks dan situasi lain yang memiliki kemiripan.
3. **Dependabilitas (*Dependability*):** Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi dan kestabilan data. Kriteri ini dicapai melalui **audit trail**, yaitu dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis dan terperinci, mulai dari desain penelitian, pedoman wawancara, catatan lapangan, transkrip, hingga proses analisis data. Dokumentasi ini memungkinkan auditor eksternal untuk melacak dan memeriksa proses penelitian yang telah dilakukan.
4. **Konfirmabilitas (*Confirmability*):** Konfirmabilitas memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar dibentuk oleh data dan responden, bukan oleh bias, preferensi, atau dugaan subjektif peneliti. Upaya untuk memenuhi konfirmabilitas dilakukan dengan **refleksivitas**, di mana peneliti secara kritis merefleksikan posisionalitas dan potensi biasnya selama proses penelitian, serta menjaga objektivitas melalui triangulasi dan audit trail.

Pendekatan validasi ini juga digunakan oleh Simbolon et al. (2024) untuk menjamin keaslian dan kekokohan temuan penelitian kualitatif di bidang kebijakan publik. Dalam konteks implementasi *Smart City*, validitas data sangat penting karena berkaitan dengan persepsi dan praktik birokrasi yang beragam di tingkat daerah.

**3.6 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan menggunakan **model interaktif Miles dan Huberman (2014)**. Model ini terdiri atas tiga tahap kegiatan yang saling terkait dan berlangsung secara siklikal, bukan linier.

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*):** Tahap ini merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data yang banyak dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen diseleksi untuk memfokuskan pada data yang relevan dengan rumusan masalah dan kerangka konseptual Thomas B. Smith. Reduksi data membantu peneliti membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang tersisa agar dapat ditarik kesimpulan yang tajam.
2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Setelah direduksi, data disajikan dalam suatu susunan yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif teks, matriks, tabel, bagan, atau peta konsep. Misalnya, data tentang hambatan implementasi dapat disajikan dalam tabel yang mengelompokkannya berdasarkan keempat unsur teori Smith. Penyajian data yang baik memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan menentukan langkah analisis selanjutnya.
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*):** Dari penyajian data, peneliti mulai menarik makna dan kesimpulan awal. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan diverifikasi terus-menerus selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek kembali ke data asli, membandingkan dengan temuan dari teknik pengumpulan lain (triangulasi), atau mendiskusikannya dengan pembimbing. Kesimpulan yang akhirnya dirumuskan diharapkan merupakan temuan yang credible dan bermakna.

Pendekatan analisis ini sesuai dengan saran Prasetyo et al. (2024), yang menekankan pentingnya proses reduksi dan verifikasi dalam penelitian implementasi kebijakan. Proses ini membantu peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan program *Smart City* di tingkat lokal. Analisis dilakukan secara induktif, di mana peneliti membangun pemahaman dan teori kecil (*substantive theory*) berdasarkan data konkret yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik kebijakan *Smart City* di Kota Bandar Lampung.

**3.7 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diakui secara jujur oleh peneliti. Pertama, keterbatasan waktu dan akses menyebabkan pengumpulan data hanya dapat dilakukan di beberapa OPD utama yang menjadi *leading sector*, seperti Dinas Kominfo dan Bappeda, sehingga mungkin tidak mencakup perspektif dari seluruh OPD yang terlibat. Kedua, tidak semua pihak atau informan kunci yang diinginkan dapat diwawancarai secara mendalam karena faktor kesibukan, jadwal yang bentrok, dan prosedur birokrasi internal yang harus dilalui untuk mendapatkan izin wawancara. Ketiga, keterbatasan dokumentasi, dimana beberapa dokumen kebijakan internal atau laporan evaluasi tertentu tidak dapat diakses secara penuh oleh publik karena alasan kerahasiaan atau belum terdokumentasi dengan baik. Wahyudi et al. (2023) juga menghadapi kendala serupa dalam penelitian *Smart City* di Bandung, di mana akses terhadap data pemerintah yang komprehensif cukup terbatas.

Meskipun demikian, peneliti telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meminimalkan dampak keterbatasan tersebut terhadap kredibilitas hasil penelitian. Upaya **triangulasi** sumber dan metode menjadi kunci utama untuk mengatasi keterbatasan akses dan jumlah informan. Semua temuan dan interpretasi lapangan diverifikasi secara berulang melalui wawancara tambahan dengan informan yang ada dan peninjauan ulang terhadap dokumen-dokumen yang berhasil diakses. Dengan pendekatan yang hati-hati dan iteratif ini, diharapkan hasil penelitian tetap valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah meskipun terdapat keterbatasan. Keterbatasan tersebut juga menjadi catatan penting dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup, menjangkau lebih banyak variasi informan, dan mengembangkan strategi untuk mengakses data pemerintah yang lebih terbuka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.  
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry.* SAGE Publications.  
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods* sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif.* Remaja Rosdakarya.  
Nur Sukmawati, E. T. Y., & Karya Lestiyani, T. E. (2023). *Realisasi Quick Win terhadap evaluasi kebijakan Smart City di Kota Jambi.* *Jurnal Fisip Publik*, 8(2), 145–160. <https://doi.org/10.24903/fpb.v8i2.2638>

Prasetyo, F. N., Basori, Y. F., & Purwanti, D. (2024). *Implementation of smart governance in the smart city program at the communication and informatics office in Sukabumi.* *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 141–155. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i2.13753>

Simbolon, D., Maigoda, T. C., Meriwati, E., Efrida, S., Yunita, & Widiastuti, H. (2024). *Policy implementation to accelerate stunting reduction: A qualitative study.* *Indonesian Journal of Health Administration (JAKI)*, 12(2), 270–279. <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i2.2024.270-279>

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D.* Alfabeta.  
Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2023). *Strategi implementasi Smart City Kota Bandung.* *Governance and Government Journal*, 18(1), 45–60. <https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.460>